

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atau dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara NKRI. Atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat pula diartikan sebagai perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya memenuhi kebutuhan dibidang social, budaya dan kemasyarakatan amat luas cakupannya. Undang- undang yang mengatur tentang Ormas adalah undang- undang Ormas No. 17 tahun 2013 yang menyebutkan asas, ciri, dan sifat, serta tidak bertentangan dengan pancasila. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan salah satu Ormas yang melakukan pendidikan politik perempuan yang didasari oleh kenyataan adanya ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, perempuan adalah kelompok yang termarjinalkan dalam dunia politik. Upaya yang dilakukan ini terhadap perempuan sangatlah penting untuk dilakukan dalam upaya untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kesetaraan ini maka perempuan akan memiliki akses untuk ikut berperan serta dalam kehidupan bernegara.

Pendidikan politik perempuan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia telah membantu dalam proses kegiatan politik. Pendidikan politik perempuan untuk merubah pola pikir dan memperbaiki posisi mereka ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat secara sosial dan politik. Inti dari pendidikan politik perempuan ini agar perempuan mempunyai kemampuan pola pikir sehingga menjadi proses pelaku pembangunan yang partisipatif dan aktif serta mampu mengawasi dan berpartisipasi dari kebijakan. Dengan melakukan beberapa perannya seperti mengadakan seminar pelatihan dan lokalkarya, *voter education*, dan *radio talkshow*.

Dari data yang peneliti temukan dilapangan, terlihat bahwa pendidikan politik perempuan yang dilakukan oleh KPI Sumbar dalam bentuk pengetahuan dan pengajaran kepada calon anggota legislatif perempuan masih belum bisa dikatakan berhasil, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya caleg perempuan yang dimentori oleh KPI Sumbar yang terpilih atau duduk dalam bangku parlemen. Hal ini bisa disebabkan masih kurang optimalnya pendidikan yang diberikan KPI kepada caleg perempuan dan juga kepada para pemilih. Anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat KPI kurang optimal dalam menyokong caleg perempuan untuk masuk dan duduk dalam parlemen.

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyarankan agar Koalisi Perempuan Indonesia beserta pihak-pihak yang terkait perempuan lainnya harus terus memberikan pendidikan politik terhadap perempuan serta meningkatkan pengawasan

dan pemantauan terhadap anggota legislaif perempuan yang terpilih. Untuk kedepannya peneliti juga menyarankan kepada lembaga atau kelompok kepentingan lainnya agar bisa berpartisipasi dalam pendidikan politik perempuan atau ikut berperan serta dalam memberikan masukan kepada anggota legislatif perempuan agar bisa membuat kebijakan yang peka akan perspektif gender.

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai LSM yang ikut mengambil peran dalam peningkatan pendidikan politik perempuan semoga bisa menjadi acuan dan contoh bagi ormas atau lembaga lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan serta merubah pola pikir kaum perempuan dalam politik dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga.

Peneliti menyarankan agar penelitian tentang lembaga-lembaga non pemerintahan atau kelompok kepentingan yang ada di daerah terus dilakukan untuk mempertambah khazanah ilmu pengetahuan baik pada tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional maupun tingkat internasional. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dilakukan cara observasi dalam teknik pengumpulan data. Observasi atau pengamatan yang mendalam perihal kekuatan politik yang ada di suatu kelompok kepentingan dalam mempengaruhi sistem politik yang ada di pemerintahan dan mampu menjawab proses penguatan peran lembaga dalam pemerintahan.